

Transportasi Publik Bukan Satu-satunya Solusi Kemacetan

Penulis : Abidatu Lintang Pradipta (Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNY)

Kita semua mengetahui bahwa mobilitas masyarakat khususnya di wilayah DIY sangatlah tinggi. Terutama warga yang bersekolah, pergi ke kampus, maupun bekerja. Tak ayal kemacetan terjadi di beberapa titik di DIY. Mengingat banyaknya sekolah, kampus, perusahaan dan perkantoran yang berada di Kota Gudeg.

Tingginya mobilitas merupakan dampak dari tingginya aktivitas ekonomi. Transportasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Kemacetan yang ada di jalan biasanya terjadi karena penumpukan kendaraan pribadi. Hal ini lumrah terjadi di negara berkembang, tak terkecuali Jogja.

Berbagai usaha untuk mengatasi kemacetan dengan transportasi publik dirasa belum maksimal. Sehingga masih banyak warga yang merasa kebutuhan mobilitasnya masih belum terpenuhi dari beberapa aspek seperti keamanan, efisiensi, kenyamanan dan lainnya.

Guna memenuhi kebutuhan akan mobilitas tersebut, Pemda DIY berusaha mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi menuju transportasi publik. Baru-baru ini pemerintah mencanangkan adanya kereta rel listrik (KRL) rute Jogja-Solo dengan anggaran Rp1 triliun.

Diharapkan proyek ini dapat menampung lebih banyak penumpang yang selama ini mengandalkan KA *Prameks*. Namun dengan semakin banyaknya jalur kereta justru menjadi masalah baru berupa kemacetan yang bertambah parah di beberapa pelintasan sebidang.

Lantas, apa yang dapat dilakukan untuk tetap melayani kebutuhan transportasi publik tanpa menimbulkan kemacetan?

Pertama, mencari rute alternatif. Untuk pelintasan sebidang sebaiknya pemerintah membuatkan jalur lain dan menghindari jalur ramai. Selanjutnya adalah penyediaan transportasi alternatif. Sehingga masyarakat beralih dari kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi publik. Seperti yang telah ada di DIY yaitu bus *Trans Jogja*. Hal tersebut dapat dimaksimalkan dengan penambahan rute dan mengintegrasikannya dengan transportasi lain seperti angkot atau bus kota lain. Usaha tersebut dapat mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya.

Pemerintah seharusnya memberikan pendidikan lebih mengenai penggunaan transportasi publik dengan segala *benefit* yang didapat. Sehingga dapat menghapus stigma masyarakat bahwa memiliki kendaraan pribadi itu lebih keren dan dianggap mampu.

Kedua, adalah evaluasi dan peningkatan keamanan dan kenyamanan layanan transportasi publik. Berikutnya adalah penyelesaian kemacetan. Transportasi publik sejatinya hanya bersifat parsial. Seperti contoh adanya bus *Trans Jogja* yang menjadi primadona di awal, namun banyak bermasalah akhir-akhir ini. Banyaknya *shelter* yang dipasang di jalan kota yang sempit, justru menambah parahnya kemacetan.

Pemerintah juga perlu mengamati pola pergerakan masyarakat di wilayah DIY. Kecenderungan pada pagi hari masyarakat bergerak menuju pusat kota, dan sorenya meninggalkan pusat kota. Hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan publik tentang jaringan transportasi publik. Sehingga tidak hanya mengandalkan KRL.

Terakhir yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu pemerataan di tiap-tiap daerah. Seperti rayonisasi sekolah, penyebaran daerah industri dan kantor pelayanan publik. Pemerintah juga hendaknya meningkatkan pajak kendaraan dan membatasi umur kendaraan. Sehingga tidak ada penumpukan kendaraan pribadi di jalan raya. Alhasil masyarakat bisa beralih ke transportasi publik.

Solusi kemacetan memerlukan terobosan baru yang tidak hanya sekedar menyediakan transportasi umum, melainkan harus menyeluruh dan berkelanjutan.